

Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau	Vol. 2 No. 1	Edition: September 2021 - Desember 2021
	http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPMPh	
Received : 19 Desember 2021	Revised: 20 Desember 2021	Accepted: 21 Desember 2021

EDUKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUTU BAGI PETUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI TERINTEGRASI DI RUMAH SAKIT GRANDMED LUBUK PAKAM

**Fithri Handayani Lubis¹, Rizka Annisa², Diana Sinulingga³,
Elisabeth Dame Manalu⁴**

Fakultas Kesehatan Masyarakat
Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua^{1,2,3,4}

e-mail : fithri.handa@gmail.com¹; rizkaannisa.mkes@gmail.com²; dianasinulingga1905@yahoo.com³;
elisabetdamemanalu@gmail.com⁴

ABSTRAK

Sistem informasi rumah sakit memiliki peranan penting dalam pelayanan klinis dan administratif. Rumah sakit memerlukan sistem informasi manajemen (SIM) dan pengelolaan administrasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan medis. SIM rumah sakit (SIMRS) dan pengelolaan administrasi rumah sakit terintegrasi dirancang untuk mengintegrasikan fungsi utama rumah sakit ke dalam satu sistem terpadu yang disimpan dalam pusat database. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 Pasal 3 menyatakan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Dalam Permenkes No. 30 Tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pemilik dan pengelola Rumah Sakit melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pemerintah menargetkan seluruh rumah sakit di Indonesia sudah mempunyai SIMRS yang sudah terintegrasi dalam Pengelolaan Administrasi Rumah Sakit. Rumah Sakit yang tidak menjalankan SIMRS dan pengelolaan administrasi dengan baik akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut, diantaranya dapat menyebabkan terjadinya Human error dan mismanagement dalam pencatatan data kesehatan, waktu tunggu pelayanan menjadi lebih lama yang dapat mengakibatkan penumpukan pasien. Pelaksanaan SIMRS dan pengelolaan administrasi yang baik dan benar akan berdampak positif pada manajemen, peningkatan efisiensi, kemudahan dalam pengambilan keputusan untuk kedepannya.

Kata kunci : SIMRS, Pengelolaan Administrasi, Rumah Sakit

ABSTRACT

Hospital information systems have an important role in clinical and administrative services. Hospitals need a management information system (MIS) and hospital administration management to improve the quality of medical services. Hospital MIS (SIMRS) and integrated hospital administration management are designed to integrate the main hospital functions into one unified system that is stored in a central database. Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 82 of 2013 Article 3 states that every hospital is obliged to implement a Hospital Management Information System (SIMRS). In Permenkes No. 30 of 2019 concerning electronically integrated business licensing or online single submission, hereinafter abbreviated as OSS, is a business license issued by the OSS institution for and on behalf of the minister, governor, or regent/mayor to hospital owners and managers through an integrated electronic system. The government is targeting all hospitals in Indonesia to have SIMRS which is integrated in the management of hospital administration. Hospitals that do not carry out SIMRS and good administrative management will affect the quality of service at the hospital, including causing human errors and mismanagement in recording health data, waiting time for services to be longer which can lead to accumulation of patients. The implementation of SIMRS and good and correct administrative management will have a positive impact on management, increase efficiency, and facilitate decision making in the future.

Keywords: SIMRS, Administrative Management, Hospital

1. PENDAHULUAN

Keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 Pasal 3 menyatakan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Dalam Permenkes No. 30 Tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pemilik dan pengelola Rumah Sakit melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pemerintah menargetkan seluruh rumah sakit di Indonesia sudah mempunyai SIMRS terintegrasi pada tahun 2018 (Permenkes RI, 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian program dan informasi Kementerian Kesehatan tahun 2017, dari 2734 Rumah sakit yang ada di Indonesia, 1432 rumah sakit telah melakukan SIMRS dan berfungsi. Sebanyak 1177 rumah sakit masih belum memiliki SIMRS, Selain itu terdapat 134 rumah sakit telah memiliki SIMRS namun belum berfungsi dengan baik (Kemenkes, 2018).

Apabila rumah sakit tidak menjalankan SIMRS dengan baik maka akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut, diantaranya dapat menyebabkan terjadinya *Human error* dan *mismanagement* dalam pencatatan data kesehatan, waktu tunggu pelayanan menjadi lebih lama yang dapat mengakibatkan penumpukan pasien (Handiwidjojo, 2009). Pelaksanaan SIMRS yang benar akan berdampak positif pada manajemen, peningkatan efisiensi, kemudahan dalam pengambilan keputusan untuk kedepannya.

Evaluasi pelaksanaan SIMRS perlu dilakukan untuk menilai manfaat yang diperoleh dari penerapan SIMRS dan agar diketahui apa saja masalah potensial yang sedang dihadapi oleh pengguna dan rumah sakit. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai pedoman untuk perbaikan dan penyempurnaan SIMRS serta mengembangkan potensi yang masih ada, sehingga SIMRS semakin baik, sempurna, dan dapat mendukung visi, misi dan tujuan rumah sakit (Sabarguna, 2008).

Penggunaan SIMRS di rumah sakit di Indonesia juga memiliki beberapa factor yang mempengaruhi penerimaan dan penghalang dalam penggunaannya. Factor penghalang tersebut adalah : (1) Kurangnya *kemampuan* pengguna untuk mengoperasikan SIMRS (*lack of skilled human*); (2) Tidak mau berubah menggunakan SIMRS (*Resistance to change*); (3) Rumitnya proses bisnis di rumah sakit (*business process complexity*); (4) Kurangnya pengetahuan tentang system yang terintegrasi (*lack of integration knowledge*) dan (5) Kurangnya teknologi keamanan data (*lack of data security technology*)

Kendala lain yang sering alami adalah kualitas sistem, perangkat pendukung (*hardware, software, dan jaringan*) belum mencukupi dan sering mengalami kendala dari segi jaringan yang tidak mensupport pengelolaan administrasi berjalan lancar. Sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan SIMRS yang belum memadai sehingga mengakibatkan SIMRS terintegrasi belum dapat dilaksanakan pada semua pelayanan. Rumah sakit tidak memiliki tenaga IT yang akan mengatur alur penggunaan SIMRS sehingga rumah sakit memiliki kendala dalam implementasi SIMRS.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam pada tanggal 14-15 September 2021. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat yang berjumlah 4 orang dosen dan 5 orang mahasiswa yang membantu dalam hal teknis selama kegiatan berlangsung. Metode yang digunakan yaitu Edukasi Implementasi Kebijakan Mutu Bagi Petugas Sistem Informasi Manajemen Dan

Pengelolaan Administrasi Terintegrasi Di Rumah Sakit yang dilakukan meliputi empat (4) tahapan yaitu :

1. Mengundang peserta

Peserta yang mengikuti kegiatan edukasi sebanyak 10 orang Petugas Rekam Medis dan Adminsitrasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam tempatnya bekerja dengan bantuan Direktur Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam untuk hadir mengikuti kegiatan edukasi pada tanggal 14-15 September 2021 di Ruang Pertemuan Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam .

2. Input

Sebelum berlangsung kegiatan edukasi peserta diwajibkan untuk melakukan pengecekan kesehatan (rapid test antigen covid-19) dan wajib menggunakan masker selama proses kegiatan berlangsung. Kepada masing-masing peserta diwajibkan membawa alat tulis dan kebutuhan lain yang dianggap perlu untuk kegiatan edukasi.

3. Proses

- a) Pelaksanaan kegiatan edukasi diawali dengan *pretest* terhadap peserta berupa soal *multiple choice question* (MCQ) sebanyak 40 butir soal untuk mengetahui tingkat pengetahuan sebelum dilakukan edukasi.
- b) Setelah *pretest* dilanjutkan dengan sesi persentasi oleh pemateri (dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat) yang membahas tentang edukasi implementasi kebijakan mutu bagi petugas sistem informasi manajemen dan pengelolaan administrasi terintegrasi di rumah sakit dan disertai dengan proses diskusi.

4. Mengevaluasi Hasil Kegiatan

Pada sesi akhir kegiatan dilakukan *post test* dengan menggunakan soal yang sama dengan *pretest* untuk mengetahui peningkatan pengetahuan sebagai hasil dari kegiatan edukasi.

3. HASIL

Adapun hasil kegiatan edukasi tentang edukasi implementasi kebijakan mutu bagi petugas sistem informasi manajemen dan pengelolaan administrasi terintegrasi di rumah sakit adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil *Pretes* dan *Postes* Peserta Edukasi Implementasi Kebijakan Mutu Bagi Petugas Sistem Informasi Manajemen Dan Pengelolaan Administrasi Terintegrasi Di Rumah Sakit

Test	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Nilai Maksimum	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi	<i>p-value</i>
<i>Pretest</i>	29	11	40	15,8	5,4	0,001
<i>Posttest</i>	39	29	40	35,7	3,2	

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *Pretes* dan *Postes* di atas terlihat peningkatan pengetahuan yang signifikan dari peserta terkait implementasi kebijakan mutu bagi petugas sistem informasi manajemen dan pengelolaan administrasi terintegrasi di rumah sakit setelah kegiatan edukasi dengan peningkatan nilai test rata-rata sebesar 19,9 poin. Selanjutnya peningkatan yang nyata juga terjadi pada peningkatan nilai tes terendah yang mengalami peningkatan sebesar 18 poin dan peningkatan nilai test tertinggi sebesar 10 poin. Dari hasil perhitungan statistik menunjukkan adanya penurunan standar deviasi dari nilai *postes* dibanding standar deviasi *pretes* dari 5,4 menjadi 3,2 dan hasil uji statistik (t-test) dengan nilai *p-value* (0,001) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan yang baik tentang implementasi kebijakan mutu bagi petugas sistem informasi manajemen dan pengelolaan administrasi terintegrasi di rumah sakit sebagai manfaat dari kegiatan edukasi yang dilakukan.

5. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan edukasi dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan para rekam medis dan administrasi rumah sakit terkait implementasi kebijakan mutu bagi petugas sistem informasi manajemen dan pengelolaan administrasi terintegrasi di rumah sakit secara umum masuk kategori baik namun tetap perlu peningkatan pengetahuan salah satunya dengan edukasi.
2. Kegiatan edukasi tentang implementasi kebijakan mutu bagi petugas sistem informasi manajemen dan pengelolaan administrasi terintegrasi di rumah sakit yang dilaksanakan bagi rekam medis dan administrasi rumah sakit di Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam secara signifikan dapat meningkatkan pengetahuan peserta.

DAFTAR PUSTAKA

Handiwidjojo, W. (2009). Rekam Medis Elektronik. EKSIS, 2, 36–41.

Kementerian Kesehatan. Tahun 2018, semua rumah sakit harus sudah punya SIMRS terintegrasi [online].

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 Pasal 3 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

Sabarguna, B.S. 2008. Quality Assurance Pelayanan RS. Jakarta: Sagung Seto, hlm. 13.